



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Dinas Komunikasi Dan Informatika selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Dan Informatika menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dikelola, dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas,
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas,
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi,
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan,
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya,
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas akuntansi dalam mendanai aktivitasnya.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, , pendapatan LO, dan beban. Laporan Keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2022. Laporan keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Nomor 8);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023;
- o. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023;
- p. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
- 2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan
- 3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 1. Ekonomi Makro
- 2. Kebijakan keuangan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 1. Entitas Akuntansi
- 2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 1. Laporan Realisasi Anggaran
- 2. Neraca
- 3. Laporan Operasional
- 4. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan

Bab VII Penutup



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

II.2. EKONOMI MAKRO

Kondisi perekonomian makro Kabupaten Cilacap dan sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 tertuang di dalam Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Kabupaten Cilacap Tahun 2023. Capaian ekonomi makro sebagai hasil pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 akan dilaporkan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap secara keseluruhan.

II.3. KEBIJAKAN KEUANGAN

Sebagai entitas akuntansi, kebijakan keuangan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika mengacu pada kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Cilacap Tahun 2023 yang mencakup kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dalam pelaksanaan anggaran sebagai pengguna anggaran, Dinas Komunikasi Dan Informatika tunduk pada mekanisme dan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.4. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

a. Dasar Hukum

Program / Kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan berdasarkan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

| No. | Program | Kegiatan | Anggaran |
|-----|---|--|------------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 23.812.250,00 |
| 2. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.699.800,00 |
| 3. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.048.860.946,00 |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

| No. | Program | Kegiatan | Anggaran |
|-----|---|--|------------------|
| 4. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 40.000.000,00 |
| 5. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 25.000.000,00 |
| 6. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 819.000.000,00 |
| 7. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 90.000.000,00 |
| 8. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 125.986.900,00 |
| 9. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 55.000.000,00 |
| 10. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 204.340.000,00 |
| 11. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 605.780.000,00 |
| 12. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 307.945.000,00 |
| 13. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.345.611.150,00 |
| 14. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 160.000.000,00 |
| 15. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 138.860.000,00 |
| 16. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 114.580.500,00 |
| 17. | Program Informasi dan Komunikasi Publik | Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 30.000.000,00 |
| 18. | Program Informasi dan Komunikasi Publik | Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 135.320.000,00 |
| 19. | Program Informasi dan Komunikasi Publik | Kegiatan Pelayanan Informasi Publik | 1.395.561.750,00 |
| 20. | Program Informasi dan Komunikasi Publik | Kegiatan Layanan Hubungan Media | 100.000.000,00 |
| 21. | Program Informasi dan Komunikasi Publik | Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | 10.000.000,00 |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

| No. | Program | Kegiatan | Anggaran |
|---------------|---|---|--------------------------|
| 22. | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis | 21.055.000,00 |
| 23. | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | 78.470.000,00 |
| 24. | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | 14.869.200,00 |
| 25. | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 49.975.000,00 |
| 26. | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 718.000.000,00 |
| 27. | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 150.000.000,00 |
| 28. | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | 3.496.000.000,00 |
| 29. | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | 141.299.000,00 |
| 30. | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 90.000.000,00 |
| 31. | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 236.815.500,00 |
| 32. | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 |
| Jumlah | | | 15.886.841.996,00 |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

III.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Berikut disajikan realisasi / capaian program / kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Pencapaian Kinerja (%)((4)/(3)) |
|-----|--|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 23.812.250,00 | 23.795.250,00 | 99,93 % |
| 2. | Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 14.699.800,00 | 14.678.200,00 | 99,85 % |
| 3. | Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.048.860.946,00 | 4.874.594.087,00 | 96,55 % |
| 4. | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 40.000.000,00 | 39.600.000,00 | 99,00 % |
| 5. | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 100,00 % |
| 6. | Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 819.000.000,00 | 814.178.895,00 | 99,41 % |
| 7. | Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 90.000.000,00 | 89.140.630,00 | 99,05 % |
| 8. | Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 125.986.900,00 | 125.584.700,00 | 99,68 % |
| 9. | Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 55.000.000,00 | 54.870.000,00 | 99,76 % |
| 10. | Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 204.340.000,00 | 204.338.240,00 | 100,00 % |
| 11. | Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 605.780.000,00 | 594.620.000,00 | 98,16 % |
| 12. | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 307.945.000,00 | 257.266.535,00 | 83,54 % |
| 13. | Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.345.611.150,00 | 1.204.857.876,00 | 89,54 % |
| 14. | Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 160.000.000,00 | 158.353.630,00 | 98,97 % |
| 15. | Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 138.860.000,00 | 129.196.750,00 | 93,04 % |
| 16. | Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 114.580.500,00 | 112.526.857,00 | 98,21 % |
| 17. | Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 30.000.000,00 | 28.952.700,00 | 96,51 % |
| 18. | Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 135.320.000,00 | 132.891.884,00 | 98,21 % |
| 19. | Kegiatan Pelayanan Informasi Publik | 1.395.561.750,00 | 1.370.526.000,00 | 98,21 % |
| 20. | Kegiatan Layanan Hubungan Media | 100.000.000,00 | 95.201.760,00 | 95,20 % |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Pencapaian Kinerja (%)((4)/(3)) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 21. | Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | 10.000.000,00 | 9.965.100,00 | 99,65 % |
| 22. | Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis | 21.055.000,00 | 18.522.300,00 | 87,97 % |
| 23. | Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | 78.470.000,00 | 72.272.300,00 | 92,10 % |
| 24. | Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | 14.869.200,00 | 14.815.500,00 | 99,64 % |
| 25. | Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 49.975.000,00 | 46.840.000,00 | 93,73 % |
| 26. | Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 718.000.000,00 | 707.500.000,00 | 98,54 % |
| 27. | Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 150.000.000,00 | 149.416.750,00 | 99,61 % |
| 28. | Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | 3.496.000.000,00 | 3.494.691.856,00 | 99,96 % |
| 29. | Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | 141.299.000,00 | 127.656.200,00 | 90,34 % |
| 30. | Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 90.000.000,00 | 69.375.000,00 | 77,08 % |
| 31. | Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 236.815.500,00 | 227.201.000,00 | 95,94 % |
| 32. | Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 99.633.300,00 | 99,63 % |
| Jumlah | | 15.886.841.996,00 | 15.388.063.300,00 | 96,86 % |

III.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

a. PENDAPATAN

Pada tahun 2023 pendapatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika realisasi anggaran kurang dari target :

| No. | Pendapatan | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | (%) ((4) / (3)) | Penjelasan |
|-----|---|------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1. | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 1.170.795.725,00 | 1.241.164.100,00 | 106,01 % | - |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

b. BELANJA

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pengelolaan belanja sehingga penyerapannya kurang antara lain :

Tabel Daftar Kegiatan yang realisasi / penyerapan anggarannya kurang dari 75 %

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Pencapaian Kinerja (%)((4)/(3)) |
|----------|------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| N | I | H | I | L |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Jumlah | | | |

Kegiatan- kegiatan yang tidak dapat terealisasi dikarenakan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

IV.1. ENTITAS AKUNTANSI

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai Entitas akuntansi.

Dinas Komunikasi Dan Informatika selaku entitas akuntansi memiliki kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan secara periodik untuk dikompilasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

IV.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Cilacap mulai menggunakan basis akrual dalam menyusun laporan keuangan. Kebijakan akuntansi untuk penerapan basis akuntansi tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap, sedangkan sistem akuntansinya diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 116 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban. Adapun untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

IV.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO dan beban.

a. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah diterima atau dikeluarkan;
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yakni mengurangi nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

| Jenis Piutang | Kualitas Piutang dan Taksiran Piutang Tidak Tertagih | | | |
|----------------------|--|---------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | Lancar < 1 tahun | Kurang Lancar 1 s.d. 2 tahun | Diragukan >2 s.d. 5 tahun | Macet >5 tahun |
| Piutang Pajak Daerah | 0,5% | 10% | 50% | 100% |

| Jenis Piutang | Kualitas Piutang dan Taksiran Piutang Tidak Tertagih | | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | Lancar 0 s.d.1 bulan | Kurang Lancar >1 s.d. 3 bulan | Diragukan >3 s.d. 12 bulan | Macet >12 bulan |
| Piutang Retribusi Daerah | 0,5% | 10% | 50% | 100% |

| Jenis Piutang | Kualitas Piutang dan Taksiran Piutang Tidak Tertagih | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | Lancar 0 s.d.1 bulan | Kurang Lancar >1 s.d. 3 bulan | Diragukan >3 s.d. 12 bulan | Macet >12 bulan |
| Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah | 0,5% | 10% | 50% | 100% |

- 4) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 5) Persediaan dicatat sebesar:
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- 6) Persediaan dinilai dengan menggunakan **Metode Masuk Pertama Keluar Pertama** yang dibuktikan dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan per tanggal 31 Desember 2023.
- 7) Sistem pencatatan persediaan dilakukan menggunakan 2 (dua) metode yaitu :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

- (1) **Metode Perpetual**, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di BLUD. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
- (2) **Metode Periodik**, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

b. Aset Tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap terdiri dari:
 - (1) Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - (2) Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - (3) Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi yang siap dipakai.
 - (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan
Mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 - (5) Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

3) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut :

| No. | Uraian | Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan |
|------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Tanah | Rp. 0,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin, terdiri atas : | |
| 2.1 | Alat Besar | Rp. 300.000,00 |
| 2.2 | Alat Angkutan | Rp. 300.000,00 |
| 2.3 | Alat Bengkel dan Alat Ukur | Rp. 300.000,00 |
| 2.4 | Alat Pertanian | Rp. 300.000,00 |
| 2.5 | Alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp. 300.000,00 |
| 2.6 | Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | Rp. 300.000,00 |
| 2.7 | Alat Kedokteran dan Kesehatan | Rp. 300.000,00 |
| 2.8 | Alat Laboratorium | Rp. 300.000,00 |
| 2.9 | Alat Persenjataan | Rp. 300.000,00 |
| 2.10 | Komputer | Rp. 300.000,00 |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

| No. | Uraian | Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan |
|------|---|----------------------------------|
| 2.11 | Alat Eksplorasi | Rp. 300.000,00 |
| 2.12 | Alat Pengeboran | Rp. 300.000,00 |
| 2.13 | Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian | Rp. 300.000,00 |
| 2.14 | Alat Bantu Eksplorasi | Rp. 300.000,00 |
| 2.15 | Alat Keselamatan Kerja | Rp. 300.000,00 |
| 2.16 | Alat Peraga | Rp. 300.000,00 |
| 2.17 | Peralatan Proses/Produksi | Rp. 300.000,00 |
| 2.18 | Rambu-Rambu | Rp. 300.000,00 |
| 2.19 | Peralatan Olah Raga | Rp. 300.000,00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas: | |
| 3.1 | Bangunan Gedung | Rp. 10.000.000,00 |
| 3.2 | Monumen | Rp. 10.000.000,00 |
| 3.3 | Bangunan Menara | Rp. 10.000.000,00 |
| 3.4 | Tugu titik Kontrol/Pasti | Rp. 10.000.000,00 |
| 4 | Jalan, Jaringan dan Irigasi, yang terdiri atas: | |
| 4.1 | Jalan dan Jembatan | Rp. 0,00 |
| 4.2 | Bangunan Air/Irigasi | Rp. 0,00 |
| 4.3 | Instalasi | Rp. 0,00 |
| 4.4 | Jaringan | Rp. 0,00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas: | |
| 5.1 | Bahan Perpustakaan | Rp. 0,00 |
| 5.2 | Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan /Olahraga | Rp. 0,00 |
| 5.3 | Hewan | |
| 5.4 | Biota Perairan | Rp. 0,00 |
| 5.5 | Tanaman | Rp. 0,00 |
| 5.6 | Barang Koleksi Non Budaya | Rp. 0,00 |
| 5.7 | Aset Tetap dalam Renovasi | Rp. 0,00 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | Rp. 0,00 |

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya.

Biaya perolehan aset terdiri dari:

- Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan/atau rabat;
- Seluruh biaya lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan kepada aset sehingga dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan Aset Tetap atau aset lainnya. Hal ini meliputi biaya konsultan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ditribusikan dengan aset, antara lain:

- a) Biaya persiapan tempat;
- b) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan bongkar muat (*handling cost*);
- c) Biaya pemasangan (*installation cost*);
- d) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- e) Biaya konstruksi;
- f) Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*).

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut serta yang tidak memenuhi Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi dan tidak menambah nilai Aset Tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap dapat dikapitalisasi pada nilai aset hanya jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat atau kapasitas, atau kualitas, dan atau volume aset yang telah dimiliki; dan
- b) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap.

Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian atau istilah berikut ini:

- a) Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 dilakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.
 - b) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.
 - c) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan menjadi jalan aspal.
 - d) Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².
- 5) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- 6) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Jangka Panjang, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

1) Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

c) Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d) Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3) Aset Tak Berwujud (ATB)

Aset tak berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

Definisi ATB mensyaratkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kerjasama pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset Tak Berwujud pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

Perolehan ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.

Perolehan ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Aset Tak Berwujud yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas bersih (*neto*) bagi entitas.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dapat dilakukan secara langsung dengan mengurangi ATB atau membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB. Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus yang dilakukan setiap akhir periode dengan masa manfaat selama 4 (empat) tahun.

Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas seperti goodwill tidak boleh diamortisasi.

4) Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, yang disebabkan rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

c. Pengukuran Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; atau pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; atau pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; atau pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; atau pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; atau pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- b. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
- c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode pelaporan keuangan.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

- d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadi.
- e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

d. Pengukuran Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- d. Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

e. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earned*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

- b. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimakannya barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.
- c. Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip *self assessment*.

d. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan

Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan Asli Daerah-LO

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:

(a) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

(b) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *official assessment*.

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode *official assessment* meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek.

Pendapatan retribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan.

Pendapatan retribusi selain tersebut di atas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD.
- d) Lain-lain PAD yang Sah-LO
 - (a) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
 - (b) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan
PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.
 - (c) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan
Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya.
Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.
Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.
- e) Pendapatan Transfer-LO
Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.
- f) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO
Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.
Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD (*realized*).

g) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

f. Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

a. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

b. Beban Barang

1) Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan aset. Dengan pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

c. Beban Hibah

Pengukuran

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

d. Beban Bantuan Sosial

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

e. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi

Pengakuan

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa manfaat (dalam bulan)}}$$

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

| NO | URAIAN | MASA MANFAAT |
|----------|---|--------------|
| 1 | ALAT BESAR | |
| - | ALAT BESAR DARAT | 10 |
| - | ALAT BESAR APUNG | 8 |
| - | ALAT BANTU | 7 |
| | | |
| 2 | ALAT ANGKUTAN | |
| - | ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR | 7 |
| - | ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR | 2 |
| - | ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR | 10 |
| - | ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR | 3 |
| - | ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA | 20 |
| | | |
| 3 | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR | |
| - | ALAT BENGKEL BERMESIN | 10 |
| - | ALAT BENGKEL TAK BERMESIN | 5 |
| - | ALATUKUR | 5 |
| | | |
| 4 | ALAT PERTANIAN | |
| - | ALAT PENGOLAHAN | 4 |
| | | |
| 5 | ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA | |
| - | ALAT KANTOR | 5 |
| - | ALAT RUMAH TANGGA | 5 |
| | | |
| 6 | ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR | |
| - | ALAT STUDIO | 5 |
| - | ALAT KOMUNIKASI | 5 |
| - | PERALATAN PEMANCAR | 10 |
| - | PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI | 15 |
| | | |
| 7 | ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | |
| - | ALAT KEDOKTERAN | 5 |
| - | ALAT KESEHATAN UMUM | 5 |
| | | |
| 8 | ALAT LABORATORIUM | |
| - | UNIT ALAT LABORATORIUM | 8 |
| - | UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR | 15 |
| - | ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA | 15 |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun 2023

| NO | URAIAN | MASA MANFAAT |
|-----------|---|--------------|
| - | ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI UNGKUNGAN | 10 |
| - | RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING | 10 |
| - | LABORATORY | |
| - | ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP | 7 |
| - | PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA | 15 |
| - | ALAT LABORATORIUM STANDARSASI KALIBRASI & | 10 |
| - | INSTRUMENTASI | |
| | | |
| 9 | ALAT PERSENJATAAN | |
| - | SENJATA API | 10 |
| - | PERSENJATAAN NON SENJATA API | 3 |
| - | SENJATA SINAR | 5 |
| - | ALAT KHUSUS KEPOUSIAN | 4 |
| | | |
| 10 | KOMPUTER | |
| - | KOMPUTER UNIT | 4 |
| - | PERALATAN KOMPUTER | 4 |
| | | |
| 11 | ALAT EKSPLORASI | |
| - | ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI | 5 |
| - | ALAT EKSPLORASI GEO FISIKA | 10 |
| | | |
| 12 | ALAT PENGEBORAN | |
| - | ALAT PENGEBORAN MESIN | 10 |
| - | ALAT PENGEBORAN NON MESIN | 10 |
| | | |
| 13 | ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN | |
| - | PERALATAN SUMUR | 10 |
| - | PERALATAN PRODUKSI | 10 |
| - | PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN | 15 |
| | | |
| 14 | ALAT BANTU EKSPLORASI | |
| - | ALAT BANTU EKSPLORASI | 10 |
| - | ALAT BANTU PRODUKSI | 10 |
| | | |
| 15 | ALAT KESELAMATAN KERJA | |
| - | ALAT DETEKSI | 5 |
| - | ALAT PELINDUNG | 5 |
| - | ALAT SAR | 2 |
| - | ALAT KERJA PENERBANGN | 10 |
| - | ALAT KEAMANAN LAIN | 5 |
| | | |
| 16 | ALAT PERAGA | |
| - | ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN | 10 |
| | | |
| 17 | PERALATAN PROSES/PRODUKSI | |
| - | UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI | 8 |
| | | |
| 18 | RAMBU-RAMBU | |
| - | RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT | 7 |
| - | RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA | 5 |
| - | RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT | 15 |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

| NO | URAIAN | MASA MANFAAT |
|-----------|---|--------------|
| 19 | PERALATAN OLAH RAGA | |
| - | PERALATAN OLAH RAGA | 3 |
| 20 | BANGUNAN GEDUNG | |
| - | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA | 50 |
| - | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL | 50 |
| 21 | MONUMEN | |
| - | CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI | 50 |
| 22 | TUGU TITIK KONTROL/PASTI | |
| - | TUGU/TANDA BATAS | 50 |
| 23 | JALAN DAN JEMBATAN | |
| - | JALAN | 10 |
| - | JEMBATAN | 50 |
| 24 | BANGUNAN AIR | |
| - | BANGUNAN AIR IRIGASI | 50 |
| - | BANGUNAN AIR PENGAIRAN PASANG SURUT | 50 |
| - | BANGUNAN AIR PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER | 25 |
| - | BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI DAN PENANGGULANGAN BENCANAALAM | 10 |
| - | BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH | 30 |
| - | BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU | 40 |
| - | BANGUNAN AIR KOTOR | 40 |
| 25 | INSTALASI | |
| - | INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU | 30 |
| - | INSTALASI AIR KOTOR | 30 |
| - | INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH | 10 |
| - | INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN | 10 |
| - | INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK | 40 |
| - | INSTALASI GARDU LISTRIK | 40 |
| - | INSTALASI PERTAHANAN | 30 |
| - | INSTALASI GAS | 30 |
| - | INSTALASI PENGAMAN | 20 |
| - | INSTALASI LAIN | 5 |
| 26 | JARINGAN | |
| - | JARINGAN AIR MINUM | 30 |
| - | JARINGAN LISTRIK | 40 |
| - | JARINGAN TELEPON/KOMPUTER/INTERNET | 20 |
| - | JARINGAN GAS | 30 |
| 27 | ASET TETAP LAINNYA | |
| - | ASET TETAP RENOVASI | 10 |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

Selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan, hewan dan tumbuhan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, dengan masa manfaat selama 4 (empat) tahun.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

f. Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Beban Transfer

Pengakuan

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

Pengukuran

Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

h. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dalam mata uang rupiah.

IV.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH.

Beberapa penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sebagai berikut:

- a. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

Untuk menerapkan pernyataan standar ini, belanja yang dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) diakui sebagai belanja pada saat diterbitkannya perintah pencairan dana (SP2D) atas SPM tersebut. Sedangkan untuk pengeluaran melalui Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran akan diakui sebagai belanja setelah terbitnya pengesahan atas pengeluaran melalui bendahara pengeluaran tersebut yang berbentuk SP2D Ganti Uang Persediaan (GU) maupun SP2D Nihil.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

V. 1. PENJELASAN POS - POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. BELANJA – LRA

| Belanja Operasi (BO) | TA 2023 | | | TA 2022 | Naik/(Turun) (Rp) |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) | |
| 1 Belanja Pegawai | 5.281.600.946,00 | 5.091.254.087,00 | 96,40 | 4.733.669.520,00 | 357.584.567,00 |
| 2 Belanja Barang dan Jasa | 9.953.925.550,00 | 9.659.179.213,00 | 97,04 | 10.657.975.807,00 | (998.796.594,00) |
| Jumlah | 15.235.526.496,00 | 14.750.433.300,00 | 96,82 | 15.391.645.327,00 | (641.212.027,00) |

Jumlah Realisasi Belanja pada TA 2023 sebesar 14.750.433.300,00 atau 96,82% dari anggaran sebesar Rp 15.235.526.496,00,00 dan turun (4,17%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp. 15.391.645.327,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.1.b.1)a) Belanja Pegawai (BP)

Belanja Pegawai (BP) realisasi seluruhnya dalam TA 2023 sebesar Rp.5.091.254.087,00 atau 96,40% dari anggarannya sebesar Rp.5.281.600.946,00 atau 107,55% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp.4.733.669.520,00.

Realisasi belanja pegawai pada TA 2023 dan TA 2022 tersebut, dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

| Belanja Pegawai | TA 2023 | | | TA 2022 | Naik/(Turun) |
|---|------------------|------------------|-------|------------------|-----------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) | (Rp) |
| 1 Belanja Gaji Pokok PNS | 2.062.284.791,00 | 2.048.024.251,00 | 99,31 | 1.979.593.640,00 | 68.430.611,00 |
| 2 Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 192.087.245,00 | 187.258.979,00 | 97,49 | 182.517.584,00 | 4.741.395,00 |
| 3 Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 77.790.000,00 | 73.430.000,00 | 94,40 | 83.690.000,00 | (10.260.000,00) |
| 4 Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 111.800.000,00 | 109.200.000,00 | 97,67 | 107.620.000,00 | 1.580.000,00 |
| 5 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 90.595.000,00 | 90.295.000,00 | 99,67 | 83.985.000,00 | 6.310.000,00 |
| 6 Belanja Tunjangan Beras PNS | 126.840.160,00 | 126.300.480,00 | 99,57 | 121.448.340,00 | 4.852.140,00 |
| 7 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 9.607.820,00 | 9.381.423,00 | 97,64 | 9.625.262,00 | (243.839,00) |
| 8 Belanja Pembulatan Gaji PNS | 47.839,00 | 30.214,00 | 63,16 | 32.933,00 | (2.719,00) |
| 9 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 158.736.109,00 | 156.522.428,00 | 98,61 | 143.199.854,00 | 13.322.574,00 |
| 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 4.324.892,00 | 4.217.496,00 | 97,52 | 4.042.548,00 | 174.948,00 |
| 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 12.944.815,00 | 12.652.675,00 | 97,74 | 12.127.825,00 | 524.850,00 |
| 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | 204.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja | 874.362.000,00 | 819.818.563,00 | 93,76 | 712.489.035,00 | 107.329.528,00 |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

| Belanja Pegawai | TA 2023 | | | TA 2022 | Naik/(Turun) | |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) | (Rp) | |
| PNS | | | | | | |
| 14 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 1.320.673.000,00 | 1.237.462.578,00 | 93,70 | 1.077.747.499,00 | 159.715.079,00 |
| 15 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 232.740.000,00 | 216.660.000,00 | 93,09 | 215.550.000,00 | 1.110.000,00 |
| 16 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 1.312.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 5.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 5.281.600.946,00 | 5.091.254.087,00 | 96,40 | 4.733.669.520,00 | 357.584.567,00 |

V.1.b.1)b Belanja Barang dan Jasa (BBJ)

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada TA 2023 sebesar Rp.9.659.179.213,00 atau 97,04% dari anggarannya sebesar Rp.9.953.925.550,00 atau 90,63% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp.10.657.975.807,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Belanja Barang dan Jasa | TA 2023 | | | TA 2022 | Naik/(Turun) | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) | (Rp) | |
| 1 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 82.594.120,00 | 82.571.050,00 | 99,97 | 57.365.300,00 | 25.205.750,00 |
| 2 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 5.995.500,00 | 5.995.500,00 | 100,00 | 3.520.000,00 | 2.475.500,00 |
| 3 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 19.604.800,00 | 19.604.800,00 | 100,00 | 0,00 | 19.604.800,00 |
| 4 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 49.017.600,00 | 46.769.850,00 | 95,41 | 43.391.050,00 | 3.378.800,00 |
| 5 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | 3.360.300,00 | 3.306.000,00 | 98,38 | 0,00 | 3.306.000,00 |
| 6 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 148.978.650,00 | 144.807.238,00 | 97,20 | 376.159.900,00 | -231.352.662,00 |
| 7 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 4.220.000,00 | 4.220.000,00 | 100,00 | 6.080.000,00 | -1.860.000,00 |
| 8 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 15.726.600,00 | 15.170.000,00 | 96,46 | 27.000.000,00 | -11.830.000,00 |
| 9 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 2.306.070,00 | 2.297.600,00 | 99,63 | 3.205.000,00 | -907.400,00 |
| 10 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 6.411.530,00 | 6.411.530,00 | 100,00 | 16.077.500,00 | -9.665.970,00 |
| 11 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 100,00 | 6.250.000,00 | -2.750.000,00 |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

| | | | | | | |
|----|---|------------------|------------------|--------|------------------|-----------------|
| | untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | |
| 12 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 9.276.000,00 | 9.276.000,00 | 100,00 | 0,00 | 9.276.000,00 |
| 13 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 127.785.000,00 | 127.009.300,00 | 99,39 | 87.290.000,00 | 39.719.300,00 |
| 14 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 91.215.400,00 | 90.884.200,00 | 99,64 | 93.117.900,00 | -2.233.700,00 |
| 15 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 40.000.000,00 | 39.600.000,00 | 99,00 | 0,00 | 39.600.000,00 |
| 16 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 14.000.000,00 | 13.944.000,00 | 99,60 | 7.800.000,00 | 6.144.000,00 |
| 17 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 47.550.000,00 | 47.050.000,00 | 98,95 | 65.750.000,00 | -18.700.000,00 |
| 18 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 177.000.000,00 | 152.290.000,00 | 86,04 | 252.020.000,00 | -99.730.000,00 |
| 19 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 104.680.000,00 | 85.420.000,00 | 81,60 | 263.790.000,00 | -178.370.000,00 |
| 20 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.334.900,00 | -226.334.900,00 |
| 21 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 405.600.000,00 | 326.300.000,00 | 80,45 | 487.500.000,00 | -161.200.000,00 |
| 22 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.000.000,00 | -366.000.000,00 |
| 23 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 46.800.000,00 | 42.900.000,00 | 91,67 | 0,00 | 42.900.000,00 |
| 24 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 109.200.000,00 | 93.600.000,00 | 85,71 | 0,00 | 93.600.000,00 |
| 25 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 100,00 | 0,00 | 4.800.000,00 |
| 26 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 486.000.000,00 | 469.000.000,00 | 96,50 | 54.795.400,00 | 414.204.600,00 |
| 27 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | 37.500.000,00 | 37.095.090,00 | 98,92 | 0,00 | 37.095.090,00 |
| 28 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 270.000.000,00 | 266.426.162,00 | 98,68 | 194.041.270,00 | 72.384.892,00 |
| 29 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 2.290.000,00 | 2.290.000,00 | 100,00 | 4.134.000,00 | -1.844.000,00 |
| 30 | Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan | 1.824.500.000,00 | 1.822.200.000,00 | 99,87 | 2.007.855.380,00 | -185.655.380,00 |
| 31 | Belanja Tagihan Telepon | 13.915.000,00 | 13.833.854,00 | 99,42 | 27.018.725,00 | -13.184.871,00 |
| 32 | Belanja Tagihan Air | 34.834.215,00 | 20.710.500,00 | 59,45 | 27.509.650,00 | -6.799.150,00 |
| 33 | Belanja Tagihan Listrik | 246.612.285,00 | 214.480.481,00 | 86,97 | 187.518.897,00 | 26.961.584,00 |
| 34 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 12.947.250,00 | 12.002.700,00 | 92,70 | 18.092.100,00 | -6.089.400,00 |
| 35 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 3.502.602.250,00 | 3.496.996.856,00 | 99,84 | 4.150.184.500,00 | -653.187.644,00 |
| 36 | Belanja Registrasi/Keanggotaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.951.684,00 | -4.951.684,00 |
| 37 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan | 16.300.000,00 | 13.031.884,00 | 79,95 | 6.577.100,00 | 6.454.784,00 |
| 38 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 52.440.000,00 | 44.740.811,00 | 85,32 | 15.793.710,00 | 28.947.101,00 |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

| | | | | | | |
|----|---|----------------|----------------|--------|----------------|-----------------|
| 39 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 3.146.400,00 | 2.624.943,00 | 83,43 | 963.672,00 | 1.661.271,00 |
| 40 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 3.933.000,00 | 3.280.372,00 | 83,41 | 1.204.584,00 | 2.075.788,00 |
| 41 | Belanja Sewa Peralatan Jaringan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572.982.000,00 | -572.982.000,00 |
| 42 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 43 | Belanja Sewa Hotel | 57.600.000,00 | 57.052.000,00 | 99,05 | 10.000.000,00 | 47.052.000,00 |
| 44 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika | 140.000.000,00 | 119.214.000,00 | 85,15 | 0,00 | 119.214.000,00 |
| 45 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei | 137.052.000,00 | 134.798.400,00 | 98,36 | 144.022.500,00 | -9.224.100,00 |
| 46 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 163.500.000,00 | 158.701.760,00 | 97,07 | 242.442.000,00 | -83.740.240,00 |
| 47 | Belanja Sosialisasi | 52.400.000,00 | 48.958.200,00 | 93,43 | 28.350.000,00 | 20.608.200,00 |
| 48 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise | 112.050.000,00 | 111.872.460,00 | 99,84 | 0,00 | 111.872.460,00 |
| 49 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya | 693.000.000,00 | 682.500.000,00 | 98,48 | 0,00 | 682.500.000,00 |
| 50 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 47.956.580,00 | 47.907.830,00 | 99,90 | 24.925.118,00 | 22.982.712,00 |
| 51 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 544.500,00 | 272.250,00 | 50,00 | 6.576.000,00 | -6.303.750,00 |
| 52 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 22.920.000,00 | 15.000.000,00 | 65,45 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 53 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 100,00 | 5.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 54 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih | 2.158.700,00 | 2.158.700,00 | 100,00 | 1.891.100,00 | 267.600,00 |
| 55 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | 100,00 | 22.615.000,00 | -10.415.000,00 |
| 56 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya | 75.000.000,00 | 73.256.750,00 | 97,68 | 75.000.000,00 | -1.743.250,00 |
| 57 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 14.600.000,00 | 14.600.000,00 | 100,00 | 28.960.000,00 | -14.360.000,00 |
| 58 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 100,00 | 0,00 | 4.350.000,00 |
| 59 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 100,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|
| 60 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 114.580.500,00 | 112.526.857,00 | 98,21 | 172.979.638,00 | -60.452.781,00 |
| 61 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 243.571.300,00 | 243.569.285,00 | 100,00 | 223.690.229,00 | 19.879.056,00 |
| 62 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750.000,00 | -8.750.000,00 |
| Jumlah | | 9.953.925.550,00 | 9.659.179.213,00 | 97,04 | 10.657.975.807,00 | -998.796.594,00 |

V.1.b.2) Belanja Modal (BM)

Realisasi Belanja Modal (BM) dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2023 dan TA 2022, sebagai berikut:

| BM-PeralatanMesin | | TA 2023 | | | TA 2022 | Naik/(Turun) |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) | (Rp) |
| 1 | BM-Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | BM-Peralatan & Mesin | 651.315.500,00 | 637.630.000,00 | 97,90 | 740.336.500,00 | -102.706.500,00 |
| 3 | BM-Gedung & Bangunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | BM-Jalan, Irigasi, & Jaringan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.418.600,00 | -137.418.600,00 |
| 5 | BM-Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | BM-Aset Tak Berwujud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jumlah | | 651.315.500,00 | 637.630.000,00 | 97,90 | 877.755.100,00 | -240.125.100,00 |

Realisasi Belanja Modal (BM) pada TA 2023 sebesar Rp.637.630.000,00 atau 97,90% dari anggarannya sebesar Rp.651.315.500,00 atau 72,64% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp. 877.755.100,00. Rincian Belanja Modal dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

V.1.b.2)a) BM-Tanah

Realisasi BM - Tanah TA 2023 sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp0,00. Realisasi BM – Tanah untuk TA 2023 tersebut dipergunakan untuk pengadaan sebagai berikut:

| BM-Tanah | | TA 2023 | | | TA 2022 | Naik (Turun) |
|---------------|---|---------------|----------------|-------------|----------------|--------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) | (Rp) |
| 1 | Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Gedung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Belanja Modal Tanah Untuk Jalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V.1.b.1)a) BM - Peralatan dan Mesin

Realisasi BM - Peralatan dan Mesin pada TA 2023 Rp.637.630.000,00 atau 97,90% dari anggarannya sebesar Rp.651.315.500,00 atau 86,13% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp. 740.336.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

| BM-Peralatan Mesin | | TA 2023 | | | TA 2022 | Naik/(Turun) |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|-------|----------------|---------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) | (Rp) |
| 1 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | 18.649.500,00 | 13.970.000,00 | 74,91 | 17.065.200,00 | -3.095.200,00 |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

| | | | | | | |
|----|---|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| 2 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 549.457.700,00 | 544.950.000,00 | 99,18 | 43.074.000,00 | 501.876.000,00 |
| 3 | Belanja Modal Peralatan Studio Gambar | 25.900.000,00 | 25.850.000,00 | 99,81 | 17.325.000,00 | 8.525.000,00 |
| 4 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.606.000,00 | -44.606.000,00 |
| 5 | Belanja Modal Personal Computer | 34.452.000,00 | 32.700.000,00 | 94,91 | 22.866.000,00 | 9.834.000,00 |
| 6 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | 21.392.300,00 | 18.700.000,00 | 87,41 | 0,00 | 18.700.000,00 |
| 7 | Belanja Modal Peralatan Mainframe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.318.000,00 | -304.318.000,00 |
| 8 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 1.464.000,00 | 1.460.000,00 | 99,73 | 0,00 | 1.460.000,00 |
| 9 | Belanja Modal Peralatan Jaringan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.392.300,00 | -287.392.300,00 |
| 10 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.690.000,00 | -3.690.000,00 |
| | Jumlah | 651.315.500,00 | 637.630.000,00 | 97,90 | 740.336.500,00 | -240.125.100,00 |

V.1.b.2)b) BM-Gedung dan Bangunan

Realisasi BM-Gedung dan Bangunan pada TA 2023 sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp0,00. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

| BM - Gedung dan Bangunan | | TA 2023 | | | TA 2022 | Naik/(Turun) |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|--------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) | (Rp) |
| 1 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Belanja Modal Bangunan Gudang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V.1.b.2)c) BM-Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi BM-Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2023 sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00 atau turun 100% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp.137.418.600,00. dengan rincian sebagai berikut:

| BM-Jalan, Irigasi dan Jaringan | | TA 2023 | | | TA 2022 | Naik (Turun) (Rp) |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) | |
| 1 | Belanja Modal Jaringan Transmisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.418.600,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.418.600,00 | -137.418.600,00 |

V.1.b.2)d) BM-Aset Tetap Lainnya

Realisasi BM-Aset Tetap Lainnya pada TA 2023 sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp0,00. terdiri dari:

| BM. Aset Tetap Lainnya | | TA 2023 | | | TA 2022 | Naik (Turun) (Rp) |
|------------------------|----------------------------|---------------|----------------|------|----------------|-------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) | (Rp) |
| 1 | Belanja Modal Buku Umum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Belanja Modal Buku Umum ya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

| | | | | | |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| Jumlah | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V.1.b.2)e) BM-Aset Tak Berwujud

Realisasi BM-Aset Tak Berwujud TA 2023 sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari anggarannya sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp0,00. dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut.

| | Belanja Modal Aset Tak Berwujud-LRA | TA 2023 | | | TA 2022 | Naik (Turun) (Rp) |
|---------------|---|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) | |
| 1 | Belanja Modal Aset Tak Berwujud – Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Hasil Kajian/Penelitian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

V.3.a. ASET LANCAR

V.3.a.1) Kas di Bendahara Penerimaan

Rekening ini menggambarkan saldo Kas Daerah yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Penerimaan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika dan belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 sebagai berikut:

| No | Kode Rek | Pendapatan | Tahun 2023 | | Tahun 2022 | |
|---------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Jumlah (Rp) | Tgl Disetor | Jumlah (Rp) | Tgl Disetor |
| 1 | 1.1.1.02.01.0001 | Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | | 0,00 | |
| Jumlah | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V.3.a.2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Rekening ini menggambarkan saldo Kas Daerah yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Komunikasi Dan Informatika dan belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Per 2023 | Per 2022 |
|----|-------------------------------------|-------------|-------------|
| | | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 1 | Kas Di Bendahara Pengeluaran - Bank | 00,00 | 0,00 |

V.3.a.3) Piutang

Rekening ini menggambarkan piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp.26.675.000,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.26.675.000,00.

| Piutang | | Per 31 Des. 2023 (Rp) | Per 31 Des. 2022 (Rp) |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|
| a) | Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 26.675.000,00 | 26.675.000,00 |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

| | | |
|---------------|----------------------|----------------------|
| | | |
| Jumlah | 26.675.000,00 | 26.675.000,00 |

V.3.a.4) Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar (Rp.26.675.000,00). Penghapusan piutang belum dilakukan karena rekanan/pihak ketiganya sudah tidak beroperasi (PT. AXIS Telekom Indonesia).

V.3.a.5) Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.00,00 . Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
|---------------|--|------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | Premi Asuransi Kendaraan Dinas Pemda | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 2 | Premi Asuransi Gedung Kantor | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 3 | Premi Asuransi Gedung Olahraga | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 4 | Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka (Oracle) | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| Jumlah | | | | | |

V.3.a.6) Persediaan

Saldo rekening ini menggambarkan harga perolehan persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

| No. | Uraian | Per 31 Desember 2023 (Rp) | Per 31 Desember 2022 (Rp) |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Bahan Bangunan dan Konstruksi | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Bahan Kimia | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Bahan Bakar dan Pelumas | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Bahan/Bibit Tanaman | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Isi Tabung Gas | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Bahan Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Alat Tulis Kantor | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Bahan Cetak | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Benda Pos | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Perabot Kantor | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Alat Listrik | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Obat | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Obat-obatan Lainnya | 0,00 | 0,00 |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

| No. | Uraian | Per 31 Desember 2023 (Rp) | Per 31 Desember 2022 (Rp) |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 17 | Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Natura | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Pakan | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH | | 0,00 | 0,00 |

Nilai persediaan yang disajikan tersebut belum termasuk persediaan dalam kondisi kadaluarsa, rusak atau usang.

V.3.b. ASET TETAP

Nilai Aset Tetap di Neraca per 31 Desember 2023 diperoleh dari nilai Neraca per 31 Desember 2022 (*audited*) ditambah dengan mutasi selama Tahun 2023 berdasarkan hasil rekonsiliasi aset tetap.

Komposisi rekening Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

| No. | Aset Tetap | Per 31 Desember 2023 (Rp) | Per 31 Desember 2022 (Rp) |
|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Tanah | 291.305.574,00 | 291.305.574,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 9.946.319.113,00 | 8.828.045.263,00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 4.027.596.139,00 | 4.027.596.139,00 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 871.041.940,00 | 871.041.940,00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Akumulasi Penyusutan | -8.360.086.675,00 | -7.204.904.750,00 |
| JUMLAH | | 6.776.176.091,00 | 6.813.084.166,00 |

Mutasi Aset Tetap Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

| KODE | NAMA REKENING | SALDO AWAL | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | SALDO AKHIR |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1.3.1 | Tanah | 291.305.574,00 | 0 | 0 | 291.305.574,00 |
| 1.3.2 | Peralatan dan Mesin | 8.828.045.263,00 | 1.222.394.350,00 | -104.120.500,00 | 9.946.319.113,00 |
| 1.3.3 | Gedung dan Bangunan | 4.027.596.139,00 | 0 | 0 | 4.027.596.139,00 |
| 1.3.4 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 871.041.940,00 | 0 | 0 | 871.041.940,00 |
| 1.3.5 | Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.3.6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.3.7 | Akumulasi Penyusutan | -7.204.904.750,00 | -1.363.332.189,00 | 208.150.264,00 | -8.360.086.675,00 |
| TOTAL ASET TETAP | | 6.813.084.166,00 | -140.937.839,00 | -104.029.764,00 | 6.776.176.091,00 |

V.3.b.1) TANAH

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 291.305.574,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 291.305.574,00. Hal tersebut menunjukkan tidak



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

adanya kenaikan dan penambahan maupun pengurangan. Aset tetap tanah per 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

| NO | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|----------|--|-----------------------|
| 1 | Saldo per 31 Desember 2022 | 291.305.574,00 |
| | MUTASI PENAMBAHAN | |
| a | Perolehan BM APBD | 0,00 |
| b | Perolehan dari BOS/BLUD | 0,00 |
| c | Perolehan dari Hibah (Komite, Non APBD, dll) | 0,00 |
| d | Reklas Antar Rekening | 0,00 |
| e | Kurang Catat/Lain-lain+ | 0,00 |
| f | Perolehan dari Brg/Jasa | 0,00 |
| g | Perolehan dari Belanja Tidak Terduga | 0,00 |
| h | Droping dari SKPD Lain | 0,00 |
| 2 | TOTAL MUTASI PENAMBAHAN (Jumlah a s/d h) | 0,00 |
| | MUTASI PENGURANGAN | |
| i | Reklas Antar Rekening | 0,00 |
| j | Penghapusan | 0,00 |
| k | Droping ke SKPD lain | 0,00 |
| l | BM jadi barang extra comtable | 0,00 |
| m | BM tidak jadi aset | 0,00 |
| n | Lebih Catat/Lain-lain- | 0,00 |
| 3 | TOTAL MUTASI PENGURANGAN (Jumlah i s/d n) | 0,00 |
| 4 | Saldo per 31 Desember 2023 | 291.305.574,00 |

V.3.b.2) Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 9.946.319.113,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 8.828.045.263,00. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp. 1.118.273.850,00 Kenaikan tersebut terdiri dari penambahan sebesar Rp. 1.222.394.350 dan pengurangan sebesar (Rp.104.120.500,00). Aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

| NO | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|----------|--|-------------------------|
| 1 | Saldo per 31 Desember 2022 | 8.828.045.263,00 |
| | MUTASI PENAMBAHAN | |
| a | Perolehan BM APBD | 637.630.000,00 |
| b | Perolehan dari BOS/BLUD | 0,00 |
| c | Perolehan dari Hibah (Komite, Non APBD, dll) | 0,00 |
| d | Reklas Antar Rekening | 0,00 |
| e | Kurang Catat/Lain-lain+ | 0,00 |
| f | Perolehan dari Brg/Jasa | 0,00 |
| g | Perolehan dari Belanja Tidak Terduga | 0,00 |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

| NO | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|----------|--|-------------------------|
| h | Droping dari SKPD Lain | 584.764.350,00 |
| 2 | TOTAL MUTASI PENAMBAHAN (Jumlah a s/d h) | 1.222.394.350,00 |
| | MUTASI PENGURANGAN | |
| i | Reklas Antar Rekening | 0,00 |
| j | Penghapusan | 0,00 |
| k | Droping ke SKPD lain | (104.120.500,00) |
| l | BM jadi barang extra comtable | 0,00 |
| m | BM tidak jadi aset | 0,00 |
| n | Lebih Catat/Lain-lain- | |
| 3 | TOTAL MUTASI PENGURANGAN (Jumlah i s/d n) | (104.120.500,00) |
| 4 | Saldo per 31 Desember 2023 | 9.946.319.113,00 |

V.3.b.3) Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.4.027.596.139,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.4.027.596.139,00. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp. 0,00. Aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

| NO | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|----------|--|-------------------------|
| 1 | Saldo per 31 Desember 2022 | 4.027.596.139,00 |
| | MUTASI PENAMBAHAN | |
| a | Perolehan BM APBD | 0,00 |
| b | Perolehan dari BOS/BLUD | 0,00 |
| c | Perolehan dari Hibah (Komite, Non APBD, dll) | 0,00 |
| d | Reklas Antar Rekening | 0,00 |
| e | Kurang Catat/Lain-lain+ | 0,00 |
| f | Perolehan dari Brg/Jasa | 0,00 |
| g | Perolehan dari Belanja Tidak Terduga | 0,00 |
| h | Droping dari SKPD Lain | 0,00 |
| 2 | TOTAL MUTASI PENAMBAHAN (Jumlah a s/d h) | 0,00 |
| | MUTASI PENGURANGAN | |
| i | Reklas Antar Rekening | 0,00 |
| j | Penghapusan | 0,00 |
| k | Droping ke SKPD lain | 0,00 |
| l | BM jadi barang extra comtable | 0,00 |
| m | BM tidak jadi aset | 0,00 |
| n | Lebih Catat/Lain-lain- | 0,00 |
| 3 | TOTAL MUTASI PENGURANGAN (Jumlah i s/d n) | 0,00 |
| 4 | Saldo per 31 Desember 2023 | 4.027.596.139,00 |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

V.3.b.4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 871.041.940,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 871.041.940,00. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp.0,00. Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

| NO | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|----------|--|-----------------------|
| 1 | Saldo per 31 Desember 2022 | 871.041.940,00 |
| | MUTASI PENAMBAHAN | |
| a | Perolehan BM APBD | 0,00 |
| b | Perolehan dari BOS/BLUD | 0,00 |
| c | Perolehan dari Hibah (Komite, Non APBD, dll) | 0,00 |
| d | Reklas Antar Rekening | 0,00 |
| e | Kurang Catat/Lain-lain+ | 0,00 |
| f | Perolehan dari Brg/Jasa | 0,00 |
| g | Perolehan dari Belanja Tidak Terduga | 0,00 |
| h | Droping dari SKPD Lain | 0,00 |
| 2 | TOTAL MUTASI PENAMBAHAN (Jumlah a s/d h) | 0,00 |
| | MUTASI PENGURANGAN | |
| i | Reklas Antar Rekening | 0,00 |
| j | Penghapusan | 0,00 |
| k | Droping ke SKPD lain | 0,00 |
| l | BM jadi barang extra comtable | 0,00 |
| m | BM tidak jadi aset | 0,00 |
| n | Lebih Catat/Lain-lain- | 0,00 |
| 3 | TOTAL MUTASI PENGURANGAN (Jumlah i s/d n) | 0,00 |
| 4 | Saldo per 31 Desember 2023 | 871.041.940,00 |

V.3.b.5) Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp0,00. Aset tetap Lainnya per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

| NO | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|----------|--|-------------|
| 1 | Saldo per 31 Desember 2022 | 0,00 |
| | MUTASI PENAMBAHAN | |
| a | Perolehan BM APBD | 0,00 |
| b | Perolehan dari BOS/BLUD | 0,00 |
| c | Perolehan dari Hibah (Komite, Non APBD, dll) | 0,00 |
| d | Reklas Antar Rekening | 0,00 |
| e | Kurang Catat/Lain-lain+ | 0,00 |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

| NO | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|----------|--|-------------|
| f | Perolehan dari Brg/Jasa | 0,00 |
| g | Perolehan dari Belanja Tidak Terduga | 0,00 |
| h | Droping dari SKPD Lain | 0,00 |
| 2 | TOTAL MUTASI PENAMBAHAN (Jumlah a s/d h) | 0,00 |
| | MUTASI PENGURANGAN | |
| i | Reklas Antar Rekening | 0,00 |
| j | Penghapusan | 0,00 |
| k | Droping ke SKPD lain | 0,00 |
| l | BM jadi barang extra comtable | 0,00 |
| m | BM tidak jadi aset | 0,00 |
| n | Lebih Catat/Lain-lain- | 0,00 |
| 3 | TOTAL MUTASI PENGURANGAN (Jumlah i s/d n) | 0,00 |
| 4 | Saldo per 31 Desember 2023 | 0,00 |

V.3.b.6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,.

V.3.b.7) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar (Rp.8.360.086.675,00) dan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp.7.204.904.750,00) dengan penambahan (Rp.1.363.332.189,00) dan pengurangan Rp.208.150.264,00.

V.3.c. ASET LAINNYA

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset lainnya selain yang telah diklasifikasi ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, dan Aset Tetap, dengan saldo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, sebagai berikut:

| Aset Lainnya | | Per 31 Des 2023 (Rp) | Per 31 Des 2022 (Rp) |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| a. | Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT) | 0,00 | 0,00 |
| b. | Aset Tidak Berwujud | 451.700.000,00 | 451.700.000,00 |
| | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | -338.775.000,00 | -225.850.000,00 |
| c. | Aset Lain-lain | 311.645.200,00 | 311.645.200,00 |
| | Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat | -307.047.528,00 | -197.071.992,00 |
| Jumlah Aset Lainnya | | 117.522.672,00 | 340.423.208,00 |

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 117.522.672,00 dan Rp. Rp. 340.423.208,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.3.c.1) Aset Tidak Berwujud

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp 451.700.000,00 dengan Akumulasi amortisasi sebesar (Rp 338.775.000,00), dan saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp 451.700.000,00 dengan akumulasi amortisasi asset tidak berwujud sebesar (Rp 225.850.000,00). Adapun rincian



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

| NAMA REKENING | | NILAI PEROLEHAN Per 31 Desember 2023 | AKUMULASI AMORTISASI | NILAI BUKU Per 31 Desember 2023 |
|---------------|--|---|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kajian Implementasi E-Government Pemerintah Kabupaten Cilacap | 451.700.000,00 | (338.775.000,00) | 112.925.000,00 |
| | Jumlah | 451.700.000,00 | (338.775.000,00) | 112.925.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Jumlah | | | |

V.3.c.2) Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain adalah merupakan aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan lagi (rusak berat) yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.311.645.200,00 dengan akumulasi penyusutan aset rusak berat (Rp.307.047.528,00) sehingga saldo Aset Lain-lain yaitu Rp.4.597.672,00.

V.3.d. KEWAJIBAN

V.3.d.1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00.

V.3.d.2) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

| No. | SKPD | Per 31 Desember 2023(Rp) | Per 31 Desember 2022 (Rp) |
|-----|---|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan HO | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | JUMLAH | 0,00 | 0,00 |

V.3.d.3) Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 terdiri dari Utang Belanja Barang dan Jasa, dengan rincian sebagai berikut:

(a) Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 15.894.704,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.4.755.605,00

| No. | SKPD | Per 31 Desember 2023 (Rp) | Per 31 Desember 2022 (Rp) |
|-----|---|------------------------------|------------------------------|
| 1 | Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS | 14.366.000,00 | 4.254.280,00 |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

| | | | |
|---------------|---|----------------------|---------------------|
| 4 | Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS | 784.506,00 | 279.137,00 |
| 5 | Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS | 244,00 | 0,00 |
| 11 | Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 606.014,00 | 181.340,00 |
| 12 | Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 34.490,00 | 10.213,00 |
| 13 | Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS | 103.450,00 | 30.635,00 |
| 14 | Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 15.894.704,00 | 4.755.605,00 |

(b) Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp.63.410.939,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.65.429.542,00

| No. | SKPD | Per 31 Desember 2023 (Rp) | Per 31 Desember 2022(Rp) |
|---------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1 | Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon | 1.055.240,00 | 2.216.411,00 |
| 2. | Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air | 1.367.800,00 | 2.337.300,00 |
| 3 | Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik | 18.667.933,00 | 18.883.315,00 |
| 4 | Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 42.319.966,00 | 41.992.516,00 |
| Jumlah | | 63.410.939,00 | 65.429.542,00 |

V.3.d.4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

V.3.e. EKUITAS

Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih pada Dinas Komunikasi dan Informatika, yang menunjukkan hak (*claim*) terhadap aset yang dikuasai, setelah dikurangi hak pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 6.814.393.12,00 dan Rp. 7.083.322.227,00.

V.4. PENJELASAN POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang tercermin dalam Pendapatan - LO, Beban dan Surplus/defisit operasional.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

V.4.a. Pendapatan-LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah Kabupaten Cilacap yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi pada TA 2023 dan TA 2022 sebagai berikut:

| Pendapatan – LO | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO | 1.241.164.100,00 | 1.201.562.850,00 |
| Pendapatan Pajak Daerah – LO | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Retribusi Daerah – LO | 1.241.164.100,00 | 1.241.164.100,00 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO | 0,00 | 0,00 |
| Lain-lain PAD Yang Sah – LO | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Transfer – LO | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO | 0,00 | 0,00 |
| Bantuan Keuangan – LO | 0,00 | 0,00 |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Hibah – LO | 0,00 | 0,00 |
| Dana Darurat – LO | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Lainnya – LO | 0,00 | 0,00 |
| Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya – LO | 0,00 | 0,00 |
| Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN – LO | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 1.241.164.100,00 | 1.201.562.850,00 |

Saldo masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

V.4.a.1) Pendapatan Asli Daerah - LO

Pos ini menggambarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 1.241.164.100,00 dan Rp. 1.201.562.850,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Pendapatan Asli Daerah – LO | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO | 1.241.164.100,00 | 1.201.562.850,00 |
| Jumlah | 1.241.164.100,00 | 1.201.562.850,00 |

V.4.a.1)a) Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

V.4.a.1)b) Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Pendapatan Retribusi Daerah – LO | | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Retribusi Pelayanan Pasar – LO | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO | 1.241.164.100.00 | 1.201.562.850.00 |
| 10 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Retribusi Terminal – LO | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Retribusi Rumah Potong Hewan – LO | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan – LO | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga- LO | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Retribusi Izin Gangguan – LO | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Retribusi Izin Trayek – LO | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) – LO | 0.00 | 0.00 |
| Jumlah | | 1.241.164.100.00 | 1.201.562.850.00 |

V.4.a.1)c) Lain-lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain PAD yang Sah – LO tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

V.4.a.2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk periode tahun 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp0,00 yang terdiri atas:

| Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO | | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---|--|--------------------|--------------------|
| 1 | Pendapatan Hibah – LO | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan – LO | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 0,00 | 0,00 |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

V.4.a.2)a) Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah – LO tahun 2023 sebesar Rp.0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Pendapatan Hibah – LO | | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
|-----------------------|---|-------------|-------------|
| 1 | Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat- LO | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah- LO | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri-LO | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 0,00 | 0,00 |

V.4.a.2)b) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan- LO

Lain-lain Pendapatan sesuai Perundang-undangan– LO tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00.

V.4.b.Beban

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*). Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Belanja adalah semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu :

| No | Beban | Belanja |
|----|--|--|
| 1. | Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual | Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas |
| 2. | Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO) | Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |
| 3. | Menggunakan Kode Akun 8 | Menggunakan Kode Akun 5 |

V.4.b.1) Beban Pegawai-LO

Beban Pegawai - LO pada tahun 2023 sebesar Rp. 5.102.393.186,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 4.738.425.125,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Beban Pegawai-LO | | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Beban Gaji Pokok PNS | 2.058.135.971,00 | 1.983.847.920,00 |
| 2 | Beban Tunjangan Keluarga PNS | 187.764.348,00 | 182.796.721,00 |
| 3 | Beban Tunjangan Jabatan PNS | 73.430.000,00 | 83.690.000,00 |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

| Beban Pegawai-LO | | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|------------------|---|--------------------|--------------------|
| 4 | Beban Tunjangan Fungsional PNS | 109.200.000,00 | 107.620.000,00 |
| 5 | Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS | 90.295.000,00 | 83.985.000,00 |
| 6 | Beban Tunjangan Beras PNS | 126.300.480,00 | 121.448.340,00 |
| 7 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 9.381.423,00 | 9.625.262,00 |
| 8 | Beban Pembulatan Gaji PNS | 30.458,00 | 32.933,00 |
| 9 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 156.947.102,00 | 143.381.194,00 |
| 10 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 4.241.773,00 | 4.052.761,00 |
| 11 | Beban Iuran Jaminan Kematian PNS | 12.725.490,00 | 12.158.460,00 |
| 12 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 819.818.563,00 | 712.489.035,00 |
| 13 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 1.237.462.578,00 | 1.077.747.499,00 |
| 14 | Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 216.660.000,00 | 215.550.000,00 |
| Jumlah | | 5.102.393.186,00 | 4.738.425.125,00 |

Perbedaan antara Beban Pegawai - LO dengan Belanja Pegawai- LRA adalah bahwa pada Beban Pegawai – LO memperhitungkan adanya transaksi – transaksi keuangan yang secara akrual sudah dapat mengurangi ekuitas atau menambah ekuitas tanpa menunggu adanya aliran kas masuk atau keluar sedangkan pada Belanja Pegawai untuk semua transaksi akan dicatat sebagai realisasi manakala ada aliran transaksi keluar.

V.4.b.2) Beban Persediaan

Beban Persediaan pada tahun 2023 sebesar Rp. 615.367.068,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 739.544.450,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Beban Barang -LO | | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|------------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 82.571.050,00 | 57.365.300,00 |
| 2 | Beban Bahan-Isi Tabung Gas | 5.995.500,00 | 3.675.000,00 |
| 3 | Beban Bahan-Bahan Lainnya | 0,00 | 12.102.800,00 |
| 4 | Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 19.604.800,00 | 0,00 |
| 5 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 46.769.850,00 | 43.391.050,00 |
| 6 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | 3.306.000,00 | 0,00 |
| 7 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 144.807.238,00 | 376.159.900,00 |
| 8 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 4.220.000,00 | 6.110.000,00 |
| 9 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 15.170.000,00 | 27.000.000,00 |
| 10 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 2.297.600,00 | 3.205.000,00 |
| 11 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 6.411.530,00 | 16.077.500,00 |
| 12 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 3.500.000,00 | 6.250.000,00 |
| 13 | Beban Natura dan Pakan-Natura | 9.276.000,00 | 0,00 |
| 14 | Beban Makanan dan Minuman Rapat | 127.009.300,00 | 87.290.000,00 |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

| Beban Barang -LO | | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 15 | Beban Penambah Daya Tahan Tubuh | 90.884.200,00 | 93.117.900,00 |
| 16 | Beban Pakaian Dinas Harian(PDH) | 39.600.000,00 | 0,00 |
| 17 | Beban Pakaian Batik Tradisional | 13.944.000,00 | 7.800.000,00 |
| Jumlah | | 615.367.068,00 | 739.544.450,00 |

V.4.b.3) Beban Jasa

Beban Jasa pada tahun 2023 sebesar Rp. 8.483.451.870,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 9.365.600.269,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Beban Jasa-LO | | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 47.050.000,00 | 65.750.000,00 |
| 2 | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 152.290.000,00 | 252.020.000,00 |
| 3 | Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 85.420.000,00 | 263.790.000,00 |
| 4 | Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 0,00 | 226.334.900,00 |
| 5 | Beban Jasa Tenaga Administrasi | 326.300.000,00 | 487.500.000,00 |
| 6 | Beban Jasa Tenaga Ahli | 0,00 | 366.000.000,00 |
| 7 | Beban Jasa Tenaga Kebersihan | 42.900.000,00 | 0,00 |
| 8 | Beban Jasa Tenaga Keamanan | 93.600.000,00 | 0,00 |
| 9 | Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 4.800.000,00 | 0,00 |
| 10 | Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 469.000.000,00 | 54.795.400,00 |
| 11 | Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | 37.095.090,00 | 0,00 |
| 12 | Beban Jasa Penyelenggaraan Acara | 266.426.162,00 | 194.041.270,00 |
| 13 | Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 2.290.000,00 | 4.134.000,00 |
| 14 | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 1.822.200.000,00 | 2.007.855.380,00 |
| 15 | Beban Tagihan Telepon | 12.672.683,00 | 26.996.337,00 |
| 16 | Beban Tagihan Air | 19.741.000,00 | 28.496.850,00 |
| 17 | Beban Tagihan Listrik | 214.265.099,00 | 191.476.133,00 |
| 18 | Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 12.002.700,00 | 18.092.100,00 |
| 19 | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 3.497.324.306,00 | 4.151.030.649,00 |
| 20 | Beban Registrasi/Keanggotaan | 0,00 | 4.951.684,00 |
| 21 | Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan | 13.031.884,00 | 6.577.100,00 |
| 22 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 44.740.811,00 | 15.793.710,00 |
| 23 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 2.624.943,00 | 963.672,00 |
| 24 | Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 3.280.372,00 | 1.204.584,00 |
| 25 | Beban Sewa Peralatan Jaringan | 0,00 | 572.982.000,00 |
| 26 | Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor | 1.300.000,00 | 0,00 |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

| Beban Jasa-LO | | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 27 | Beban Sewa Hotel | 57.052.000,00 | 10.000.000,00 |
| 28 | Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise | 111.872.460,00 | 0,00 |
| 29 | Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya | 682.500.000,00 | 0,00 |
| 30 | Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika | 119.214.000,00 | 0,00 |
| 31 | Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei | 134.798.400,00 | 144.022.500,00 |
| 32 | Beban Kursus Singkat/Pelatihan | 158.701.760,00 | 242.442.000,00 |
| 33 | Beban Sosialisasi | 48.958.200,00 | 28.350.000,00 |
| Jumlah | | 8.483.451.870,00 | 9.365.600.269,00 |

V.4.b.4) Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada tahun 2023 sebesar Rp. 314.772.387,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 338.446.856,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Beban Pemeliharaan | | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 47.907.830,00 | 24.925.118,00 |
| 2 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 272.250,00 | 6.576.000,00 |
| 3 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 15.000.000,00 | 0,00 |
| 4 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel | 7.500.000,00 | 5.500.000,00 |
| 5 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih | 2.158.700,00 | 1.891.100,00 |
| 6 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 12.200.000,00 | 22.615.000,00 |
| 7 | Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya | 73.256.750,00 | 75.000.000,00 |
| 8 | Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 14.600.000,00 | 28.960.000,00 |
| 9 | Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | 4.350.000,00 | 0,00 |
| 10 | Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan | 25.000.000,00 | 0,00 |
| 11 | Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 112.526.857,00 | 172.979.638,00 |
| Jumlah | | 314.772.387,00 | 338.446.856,00 |

V.4.b.5) Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2023 sebesar Rp. 243.569.285,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 223.690.229,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Beban Perjalanan Dinas | | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Beban Perjalanan Dinas Biasa | 243.569.285,00 | 223.690.229,00 |
| Jumlah | | 243.569.285,00 | 223.690.229,00 |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

V.4.b.6) Beban Hibah

Beban Hibah pada tahun 2023 sebesar Rp.0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

| | Beban Hibah | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---|--|--------------------|---------------------|
| 1 | Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 0,00 | 8.750.000,00 |
| | dst | | |
| | Jumlah | 0,00 | 8.750.000,00 |

V.4.b.7) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.475.507.391,00 dan tahun 2022 sebesar Rp. 1.481.508.484,00 dengan rincian sebagai berikut:

| | Beban Penyusutan dan Amortisasi | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 1.223.802.207 | 1.233.090.827 |
| 2 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 95.418.566 | 95.418.566 |
| 3 | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan | 43.361.618 | 40.074.091 |
| 4 | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0 | 0 |
| 5 | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 112.925.000,00 | 112.925.000,00 |
| | Jumlah | 1.475.507.391,00 | 1.481.508.484,00 |

V.4.b.8) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang pada tahun 2023 sebesar Rp 0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

| | Beban Penyisihan Piutang | Tahun 2023 (Rp) | Tahun 2022 (Rp) |
|---|---|--------------------|--------------------|
| 1 | Beban Penyisihan Piutang Pajak | | |
| 2 | Beban Penyisihan Piutang Retribusi | | |
| 3 | Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah | | |
| 4 | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya | | |
| | Jumlah | | |

V.4.c. Surplus/Defisit dari Operasi – LO

Surplus/Defisit dari Operasi tahun 2023 sebesar (Rp. 14.993.897.087,00) dan tahun 2022 adalah sebesar (Rp. 15.694.402.563,00).

V.4.d. Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO

Penjualan Aset Non Lancar tahun 2023 sebesar Rp 00,00 dan tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00.

V.4.e. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Surplus dari Non Operasional Lainnya tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

V.4.f. Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO

Defisit Penjualan Aset Non Lancar tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 adalah sebesar Rp 0,00.

V.4.g. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Defisit dari Non Operasional Lainnya tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00 merupakan Pengakuan Beban Non Operasional sebesar Rp0,00.

V.4.h. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit Non Operasional pada tahun 2023 sebesar Rp.0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp 0,00.

V.4.i. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa pada tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00.

V.4.j. Pos Luar Biasa - LO

Pendapatan Luar Biasa pada tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00.

V.5. PENJELASAN POS - POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas per 31 Desember 2023.

Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 6.814.393.120,00 berasal dari saldo awal Ekuitas tahun 2023 sebesar Rp. 7.083.322.227,00 ditambah Surplus/Defisit - LO tahun 2023 sebesar (Rp. 14.993.897.087,00) ditambah koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp.578.068.780,00 dan kewajiban yang dikonsolidasikan Rp. 14.146.899.200,00.

V.5.a. Ekuitas Awal

Ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp. 7.083.322.227,00 merupakan saldo ekuitas per 31 Desember 2022.

V.5.b. Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit – LO tahun 2023 sebesar (Rp. 14.993.897.087,00) berasal dari Pendapatan – LO sebesar Rp. 1.241.164.100,00 dikurangi Beban sebesar Rp. 16.235.061.187,00 ditambah Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00. Penjelasan secara rinci dapat dilihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

V.5.c. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya tahun 2023 sebesar Rp. 578.068.780,00 sedangkan tahun 2022 sebesar (Rp. 378.728.601,00) Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2023 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

| NO | URAIAN | NOMINAL (Rp) | KETERANGAN |
|----|--------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | Koreksi Nilai Kas | 0,00 | |
| 2 | Koreksi Nilai Piutang | 0,00 | |
| 3 | Koreksi Nilai Persediaan | 0,00 | |
| 4 | Koreksi Nilai Aset Tetap | 0,00 | |
| | - Kurang Catat | 0,00 | |
| | - Penghapusan dengan SK | 0,00 | |
| | - Mutasi dari SKPD Lain | 584.764.350,00 | Dropping dr BPKAD |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

| NO | URAIAN | NOMINAL (Rp) | KETERANGAN |
|----|--|-----------------------|--------------------------------|
| | - Hibah | 0,00 | |
| | - Mutasi ke SKPD Lain | -104.120.500,00 | |
| | - Penjualan aset tetap | 0,00 | |
| | Koreksi Nilai Akumulasi Aset Tetap | -749.798,00 | Akm Aset Droping dr BPPKAD dan |
| | Koreksi Nilai Akumulasi Aset Tetap | 94.107.068,00 | Akm Aset Droping Keluar |
| | Koreksi Nilai Akumulasi Aset Lain-lain | 4.067.660,00 | Penyesuaian Saldo awal |
| | Koreksi Nilai Aset Tidak Berwujud | 0,00 | |
| | Koreksi Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 0,00 | |
| | Koreksi Nilai Kewajiban | 0,00 | |
| | Koreksi Pendapatan LO | 0,00 | |
| | JUMLAH | 578.068.780,00 | |



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

VI.1. INFORMASI UMUM MENGENAI SKPD

a. Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab kepada Bupati Cilacap dan mempunyai Tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa.

b. Tugas

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

c. Susunan organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, yang diuraikan dan digambarkan sebagai berikut :

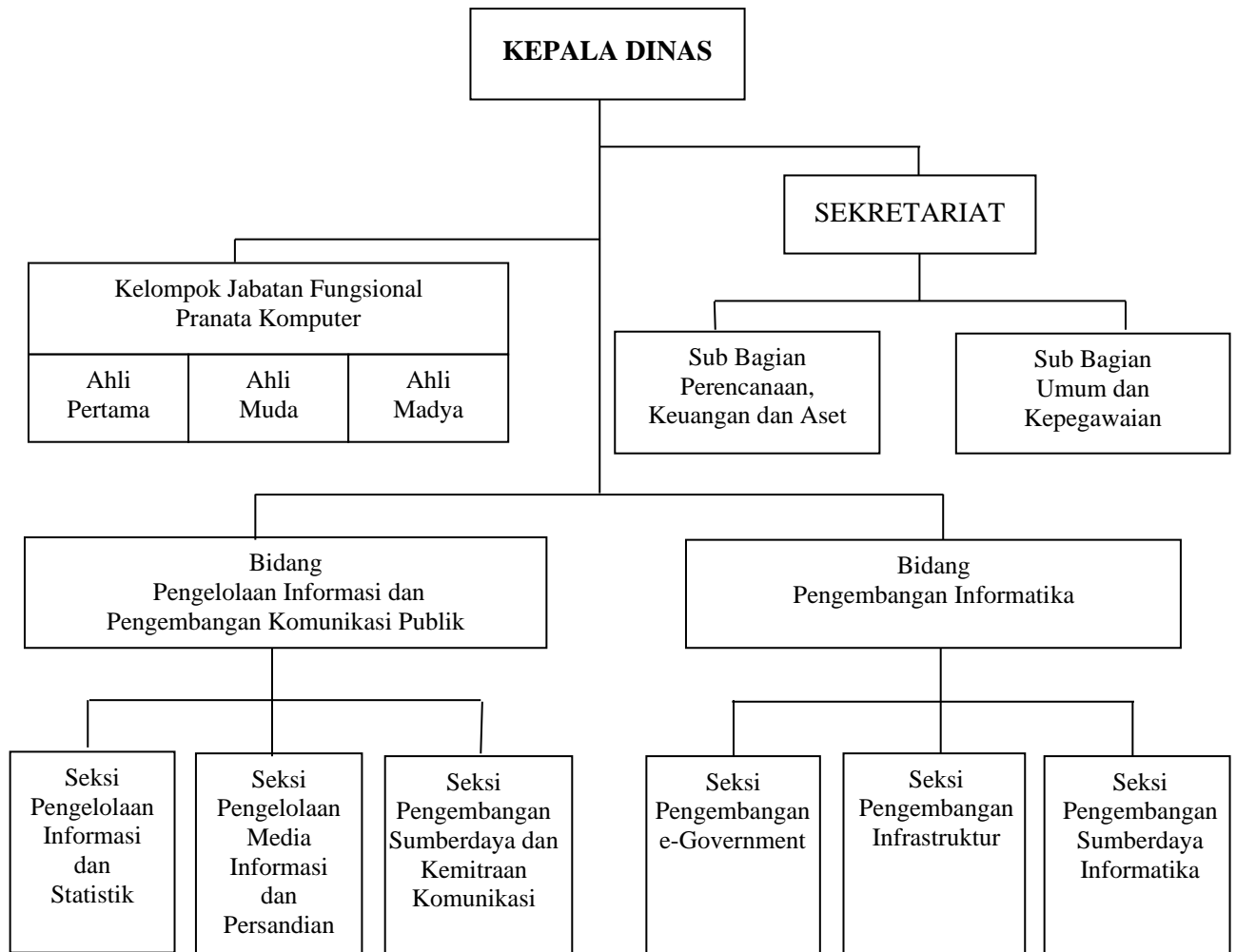
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi dan Statistik;
 - b. Seksi Pengelolaan Media Informasi dan Persandian;
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kemitraan Komunikasi.
4. Bidang Pengembangan Informatika, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan E-Government;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

- b. Seksi Pengembangan Infrastruktur;
- c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Informatika.

Berdasarkan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap memiliki Struktur organisasi sebagai berikut :





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun 2023

BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan uraian penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika baik. Hal ini tergambar dari pencapaian efektifitas dan efisiensi dari program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan TA 2023 sebesar Rp. 1.241.164.100,00 atau 106,01% dari anggarannya sebesar Rp. 1.170.795.725,00 atau naik/turun 103,30% dari realisasi pada TA 2022 sebesar Rp. 1.201.562.850,00.

2. Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2023 sebesar Rp. 15.388.063.300,00 atau 96,86% dari anggarannya sebesar Rp. 15.886.841.996,00 atau naik/turun 94,58% dari realisasi pada TA 2022 sebesar Rp. 16.269.400.427,00.

3. Aset

Aset dan Piutang yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2023 terdiri dari:

- a) Persediaan sebesar Rp.0,00.
- b) Aset tetap sebesar Rp. 15.136.262.766,00 dengan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp.8.360.086.675,00) sehingga saldo Aset tetap sebesar 6.776.176.091,00.
- c) Aset lain-lain sebesar Rp. 311.645.200,00 dengan Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat Rp. (307.047.528,00) sehingga saldo Aset Lain-lain sebesar Rp.4.597.672,00.
- d) Piutang sebesar Rp.26.675.000,00 dengan Penyisihan piutang sebesar (Rp.26.675.000,00).

Adapun kendala dan hambatan yang kami hadapi terutama dalam hal :

1. Keterbatasan sumber daya manusia
2. Peraturan perundang-undangan yang selalu berubah-ubah
3. dst

Namun demikian berbagai upaya telah kami lakukan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika diantaranya menggali potensi yang ada dengan mempelajari berbagai referensi yang ada dan belajar dari pengalaman yang lalu serta mengoptimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya pendukung lainnya, disisi lain yang masih kurang kami perbaiki dan yang sudah baik kami pertahankan.

Cilacap, 31 Desember 2023

KEPALA SKPD/BLUD

SUPRIYANTO, S.H., M.Si.

NIP. 19650825 199403 1 009